



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN
ANGGARAN 2024**



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Daeng Celak Gedung A Lantai 3 dan 4 Senggarang

Kota Tanjungpinang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang semakin meningkat di Tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanjungpinang, Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG



SAMSUDI, S.Sos., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang ditetapkan, sebagaimana terlampir pada gambar 1.1 Struktur Organisasi halaman 6 laporan ini, terdiri dari:

- a. Kepala Badan,
- b. Sekretaris yang membawahi 1 Sub Bagian,
- c. Bidang terdiri dari 3 Bidang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang

ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya Tujuan Kota Tanjungpinang yaitu : “**Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing**” dengan Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan indikator sasaran yaitu persentase konflik sosial tertangani, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mempedomani tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dengan tujuan melestarikan nilai seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan kondusifitas wilayah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Tanjungpinang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 3 (tiga) tahun mendatang yaitu “*Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang*”. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: *Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah.*

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain penanganan masalah strategis dan kontingensi di daerah, wawasan kebangsaan, pembauran dan ketahanan bangsa, kewaspadaan dini masyarakat, dan kehidupan politik yang demokratis di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 termasuk berhasil dengan kategori **sangat baik**;
2. Kategori penilaian keberhasilan capaian indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori **sangat baik** (sebesar $\geq 85\%$);

3. Anggaran program yang menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebesar **Rp. 25.361.338.682** atau sebesar 96,45% dari anggaran yang ditargetkan sebesar **Rp. 26.295.814.206** artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 3,55% atau secara absolut sebesar **Rp. 934.475.524;**
4. Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;
 - c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
 - e. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Gambaran Umum	4
1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	14
1.5. Isu Strategis	15
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Perencanaan Strategis Tahun 2024-2026	18
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026	22
2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	23
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Rencana Tindak Lanjut	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	8
Tabel 1.2	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	9
Tabel 1.3	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2024	10
Tabel 1.4	Komposisi PNS Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang	11
Tabel 1.5	Daftar APBD dan APBDP Tahun 2024	12
Tabel 1.6	Daftar Aset per 31 Desember 2024	13
Tabel 1.7	Daftar Kendaraan Dinas Tahun 2024	14
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Tujuan RPD, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2024-2026	23
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024	23
Tabel 2.4	APBD Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang Tahun 2024	27
Tabel 2.5	APBDP Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang Tahun 2024	27
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Daerah	29
Tabel 3.2	Capaian Realisasi Kinerja OPD	30
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis dengan tahun sebelumnya	32
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2020-2024	33
Tabel 3.5	Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Kinerja	34
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja dengan SPM	35
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 3.8	Data Kejadian Konflik Tahun 2024	36
Tabel 3.9	Jumlah SKT dan rekomendasi penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang sudah diterbitkan	39
Tabel 4.0	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	41
Tabel 4.1	Pendidikan Politik Tahun 2024	42
Tabel 4.2	Realisasi Fisik dan Keuangan per Sub Kegiatan Tahun 2024	48
Tabel 4.3	Perbandingan antara Target Renstra 2024-2026 dengan Realisasi 2024	59
Tabel 4.4	Realisasi Keuangan per Kegiatan Tahun 2024	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	8
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	9
Grafik 1.3	Komposisi PNS berdasarkan Golongan Tahun 2024	10
Grafik 1.4	Komposisi PNS per Bidang Tahun 2024	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	7
Gambar 3.1	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2024	44
Gambar 3.2	Partisipasi Masyarakat dalam PILKADA Kota Tanjungpinang Tahun 2024	45

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 58 salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2024-2026 dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan pertanggung jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala SKPD menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 kepada Walikota Tanjungpinang.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

1.3 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, berdasarkan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan,

- keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.” Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) yang menyebutkan bahwa anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44). Adapun Uraian Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasai Kemasyarakatan, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA TANJUNGPINANG



WALI KOTA TANJUNGPINANG,
ttd.
RAHMA

1.3.3 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yang merupakan pelaksana tugas pokok dan fungsi selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada tahun 2024 berjumlah 38, 24 PNS, 3 PPPK dan 11 tenaga Honorer. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 22 perempuan (57,89%) dan 16 laki-laki (42,11%). Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 15,79% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1

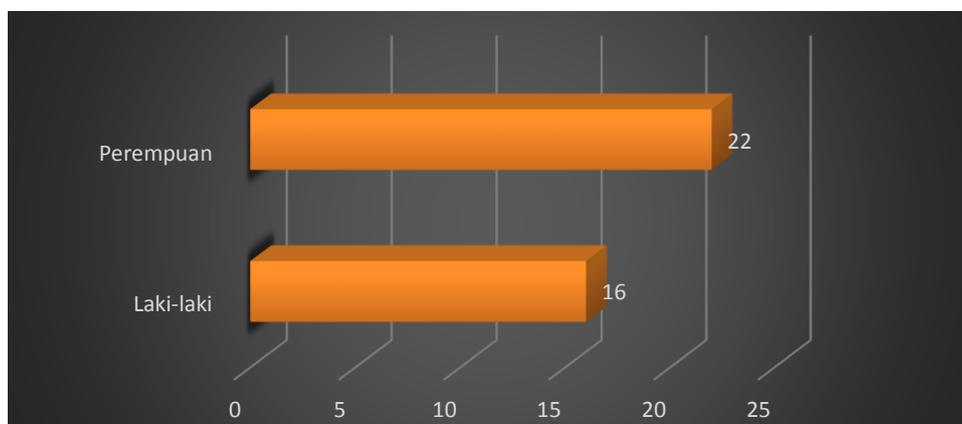
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	16	42,11
2	Perempuan	22	57,89
Total		38	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2024

Secara grafik dapat digambarkan pada grafik 1.1

Grafik 1.1.
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK disajikan pada tabel 1.2:

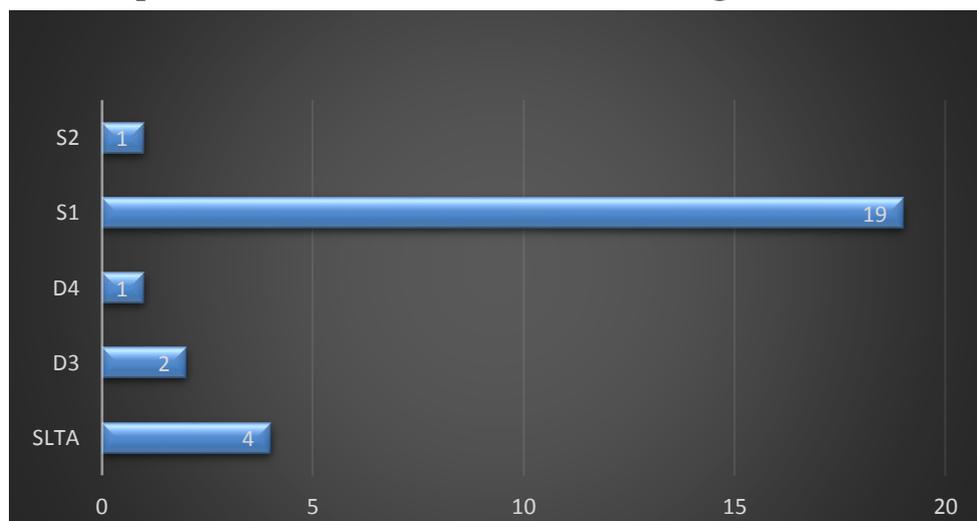
Tabel 1.2.
Komposisi PNS dan PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SLTA	4	14,81
2	DIPLOMA III/ D-3	2	7,41
3	D-4	1	3,70
4	STRATA 1	19	70,37
5	STRATA 2	1	3,70
JUMLAH		27	100

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2024

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi PNS dan PPPK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas yakni 3,7% sarjana S2, 70,37% sarjana S1, 3,7% Diploma 4, 7,41% Diploma 3, dan sisanya 14,81% SLTA. Perlu adanya motivasi bagi PNS di kelompok lulusan SLTA sederajat untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.2 di bawah ini:

Grafik 1.2
Komposisi PNS dan PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2024

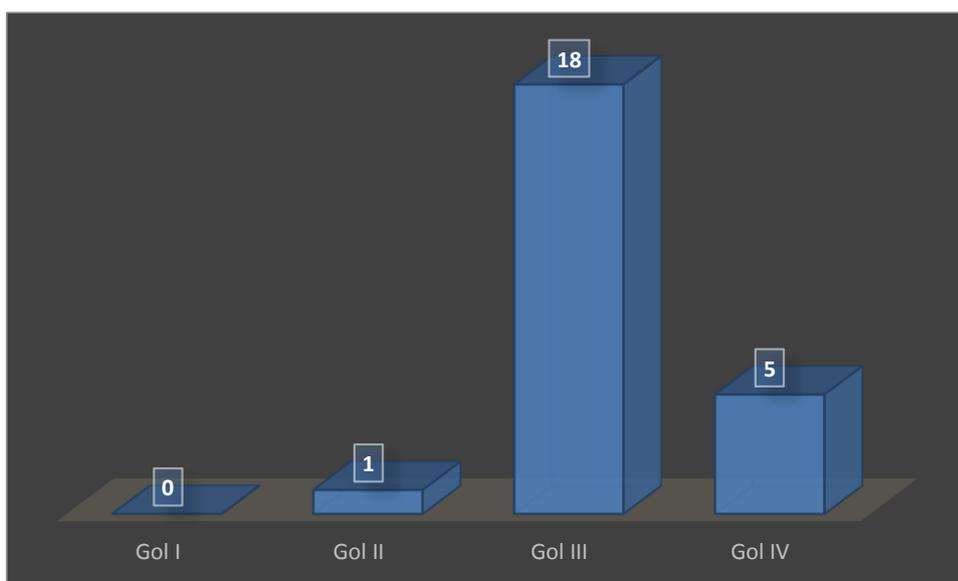
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3.
Komposisi PNS berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	1	4,17
3	Golongan III	18	75,00
4	Golongan IV	5	20,83
JUMLAH		24	100

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2024

Grafik 1.3
Komposisi PNS berdasarkan Golongan



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2024

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah:

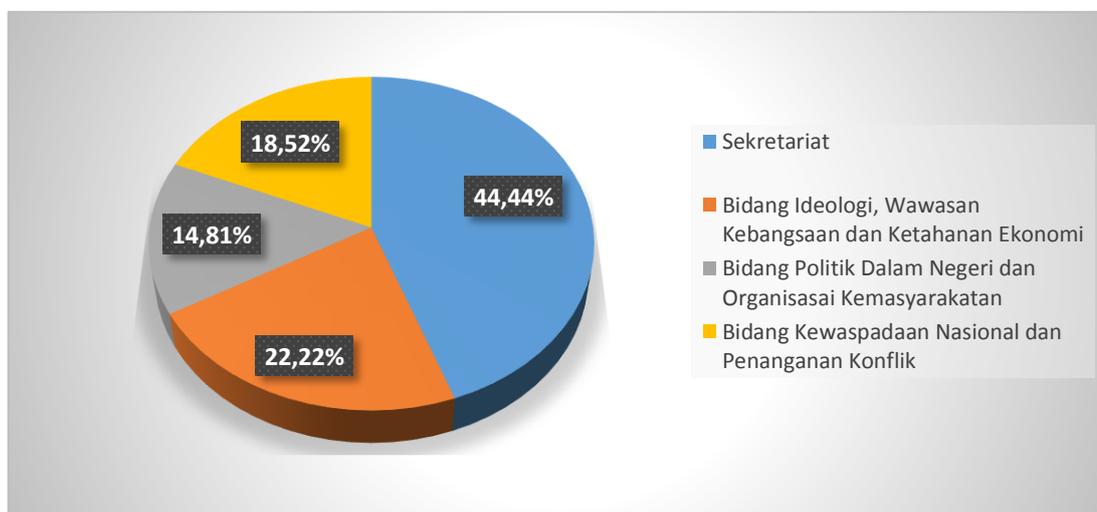
Tabel 1.4
Komposisi PNS dan PPPK Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang

NO	Bidang	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sekretariat	12	44,44
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	6	22,22
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	4	14,81
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5	18,52
JUMLAH		27	100

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2024

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 44,44% pegawai berada di sekretariat, sedangkan sisanya pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik 1.4 di bawah ini:

Grafik 1.4
Komposisi PNS dan PPPK Per Bidang



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, 2024

1.3.3.2 Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Tanjungpinang. Pada tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.897.961.708 dengan rincian belanja operasi Rp. 25.832.976.008 dan belanja modal Rp. 64.985.700 sebagaimana diubah dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 yang disahkan tanggal 23 Desember 2024 menjadi sebesar Rp. 26.295.814.206 dengan rincian belanja operasi Rp. 26.293.919.206 dan belanja modal Rp. 1.895.000, yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.5
Daftar APBD dan APBDP Tahun 2024

No	Uraian Belanja	APBD (Rp)	APBDP (Rp)
1	Belanja Operasi	25.832.976.008	26.293.919.206
2	Belanja Modal	64.985.700	1.895.000
Total		25.897.961.708	26.295.814.206

1.3.3.3 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Nilai aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 674.941.347,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 674.197.947,- dan aset lancar Rp. 743.400,-. Sarana dan prasarana yang dikelola per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.6
Daftar Aset Per 31 Desember 2024

No	Jenis Barang	Jumlah
I.	ASET TETAP	674.197.947,-
1	Golongan Tanah Tanah	0,-
2	Golongan Peralatan dan Mesin - Alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan alat ukur - Alat pertanian - Alat kantor dan rumahtangga - Alat studio, komunikasi dan pemancar - Alat laboratorium - Alat Persenjataan - Komputer	3.402.153.720,- 1.430.000,- 568.718.600,- 2.981.000,- 26.400.000,- 1.767.950.810,- 66.638.000,- 70.500.000,- 7.700.000,- 889.835.310,-
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	377.585.801,- 377.585.801,-
4	Jalan, jaringan dan irigasi - Instalasi	34.870.000,- 34.870.000,-
5	Akumulasi Penyusutan	(3.140.411.574,-)

Sumber : Rekapitulasi Barang Ke Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang TA 2024

1.3.3.4 Sarana dan Prasarana

Faktor penting lainnya, selain sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan Gedung A lantai 3-4 Gedung Bersama perkantoran jalan Daeng Marewa yang merupakan aset Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tercatat pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang memiliki 4 (empat) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.6 dibawah:

Tabel 1.7
Daftar Kendaraan Dinas

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Mobil	Toyota Innova G 2.0	Operasional Kepala Badan
2	Mobil	Avanza	Operasional Sekretaris
3	Mobil	Kijang SX	Operasional Keuangan
4	Mobil Pick Up	Toyota Hilux 2.0	Operasional Administrasi
5	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
6	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio	Operasional Administrasi
7	Sepeda Motor	Suzuki Smash	Operasional Administrasi
8	Sepeda Motor	Honda Kharisma	Operasional Administrasi

Sumber : Data asset Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, 2024

1.4. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang

- Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau: 4,51/2023);
 9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 72, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau: 6,26/2024);
 10. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 461);
 11. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504);
 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 521) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 532).

1.5. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang di tahun 2024, diantaranya:

1. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah

Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha bermukim maupun berusaha tidak bermukim) apalagi kota Tanjungpinang merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau sehingga menyebabkan kerawanan sosial maupun kerawanan

terjadinya konflik. Kota Tanjungpinang juga berpotensi adanya gangguan keamanan seperti ancaman teroris, pelaksanaan kebijakan pemerintah, Pungli, dan Narkoba;

2. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat

Setelah pandemi kasus covid 19 di Kota Tanjungpinang, pembangunan di Kota Tanjungpinang semakin meningkat dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala besar, menengah maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan. Kasus yang terjadi adalah perkelahian antar suku, faham radikalisme, narkoba, dan pertikaian antar kelompok;

3. Adanya lalu lintas orang asing karena letak geografis Kota Tanjungpinang yang terletak diperbatasan mengakibatkan kerawanan konflik sosial;

4. Belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman, dan terbukanya wilayah Kota Tanjungpinang menyebabkan rentannya luruh budaya Melayu;

5. Belum optimal pembinaan terhadap Ormas dan LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;

6. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi

7. Rendahnya perilaku sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan;

8. Adanya potensi konflik sosial akibat perkembangan budaya, iptek dan teknologi;

9. Masih ditemukan orang asing/Warga Negara Asing yang berkunjung maupun tinggal di Kota Tanjungpinang yang dokumen keimigrasiannya tidak sesuai untuk peruntukannya;

10. Munculnya paham radikalisme dan mulai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;

11. Berkembangnya berita *hoax* (berita bohong) yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adanya berita *hoax* akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang selama Tahun 2024. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. BAB I : Pendahuluan**
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2024, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2. BAB II : Perencanaan Kinerja**
Memuat perencanaan strategis 2024-2026, Indikator Kinerja Utama 2024-2026, Rencana Kerja Tahunan 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- 3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja**
Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2024.
- 4. BAB IV : Penutup**
Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024-2026

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tujuan ke-4 dalam RPD yaitu Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera, dan Inovatif). Untuk mencapai tujuan RPD tersebut, tujuan yang ditetapkan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang”.

Renstra disusun sebagai upaya mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate*. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang merupakan perencanaan tiga tahun yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikator Kegiatan dalam periode tahun 2024-2026. Oleh karena itu, Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolak ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2024. Garis besar Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Hubungan RPD Tahun 2024-2026, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Tujuan RPD, Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan ke 4 (empat) RPD	TUJUAN	SASARAN
	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera, dan Inovatif)	Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial serta pendidikan politik masyarakat masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 disusun strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi;
2. Peningkatan kapasitas partai politik;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PemiluKada dan pemilu;
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan peran serta dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

6. Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat serta organisasi keagamaan dalam mengembangkan moderasi kehidupan beragama;
7. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan Bangsa;
8. Fasilitasi penanganan konflik sosial

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program tiga tahun dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Monitoring pelaksanaan pemilu/pemilukada melalui Desk;
2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi instansi penyelenggara pemilu/pemilukada;
3. Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemilu/pemilukada;
4. Pendidikan politik bagi kader politik dan masyarakat;
5. Peningkatan pengetahuan bagi masyarakat dalam berdemokrasi;
6. Meningkatkan pengetahuan pengurus Organisasi Kemasyarakatan terkait partisipasi dalam pembangunan Kota Tanjungpinang;
7. Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan guna menguatkan identitas masyarakat yang berkarakter Pancasila;
8. Penguatan pengembangan kerukunan umat beragama dalam mengembangkan moderasi kehidupan beragama;
9. Menyusun kebijakan teknis terhadap pelaksanaan kewaspadaan nasional di daerah;
10. Meningkatkan peran instansi dan masyarakat dalam penanganan kewaspadaan nasional di daerah;
11. Meningkatkan pembinaan instansi dalam penanganan kewaspadaan nasional di daerah.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Tanjungpinang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka

memberikan dukungan atas tujuan ke-4 RPD 2024-2026 yaitu "Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera, dan Inovatif)".

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Tanjungpinang, yang menjadi program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang 2024-2026 telah mengacu pada RPD Kota Tanjungpinang 2024-2026. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPD tahun 2024-2026, antara lain:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, maka dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 telah ditetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-

2026 yang mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, seperti ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Awal	Target kinerja tujuan/sasaran			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<p><u>Tujuan 1 :</u></p> <p>Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang</p> <p><u>Sasaran 1:</u></p> <p>Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah</p>	<p>Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik</p> <p>Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih</p> <p>Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi</p>	<p>96</p> <p>-</p> <p>100</p>	<p>96</p> <p>65</p> <p>100</p>	<p>97</p> <p>-</p> <p>100</p>	<p>98</p> <p>-</p> <p>100</p>	<p>98</p> <p>-</p> <p>100</p>

2.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2024, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial,	100%	<p>Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.</p> <p>Sub kegiatan : 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p>

	<p>pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah</p>	<p>budaya (ipoleksos bud) yang difasilitasi</p>		<p>2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p> <p>3 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.</p> <p>4 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka.</p> <p>5 Pembentukan Paskibraka.</p> <p>6 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>7 Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>8 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.</p> <p>Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.</p> <p>Sub kegiatan : 1 Penyusunan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.</p> <p>Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.</p> <p>Sub kegiatan : 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p> <p>2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p> <p>3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga</p>
--	---	---	--	---

				Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. 4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.
		Persentase partai dan Ormas yang aktif dan memahaminya hak dan kewajibannya (tidak berkonflik)	65%	<p>Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</p> <p>Sub Kegiatan : 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.</p>
				<p>Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Sub Kegiatan : 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.</p>
				<p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</p> <p>Sub Kegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</p> <p>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</p> <p>Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.</p> <p>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</p> <p>Sub Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.</p> <p>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p>

				Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan : 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan : 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
--	--	--	--	--

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai. Dalam dokumen perjanjian kinerja terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Walikota Tanjungpinang selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan program dan kegiatan, untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
APBD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Program	Anggaran	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.154.720.536,-	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.072.237.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	14.767.861.846,-	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	110.000.000,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	282.616.000,-	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.510.526.400,-	APBD
JUMLAH		25.897.961.708,-	

Pada Tahun 2024, terdapat perubahan APBD, sehingga anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

Tabel 2.5
APBDP Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Program	Anggaran	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	5.204.647.536,-	APBDP
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.882.041.500,-	APBDP
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	14.759.462.770,-	APBDP
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	74.654.000,-	APBDP

5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	301.371.000,-	APBDP
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4.073.637.400,-	APBDP
JUMLAH		26.295.814.206,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

CAPAIAN REALISASI KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tahun : 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Hasil	Target	Realisasi	Hasil	Target	Realisasi	Hasil
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang kebangsaan dan bernegara dalam wadah NKRI	Terantisipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKSOSBUDH ANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar	Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100			
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di badan kesbangpol kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	%	100	100	100	100	100	100			
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan		Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	%							96	96	100
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	%							65	66,44	102,215

Kota Tanjungpinang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	%							100	100	100
-----------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Renstra 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang mempunyai 1 tujuan dengan 2 indikator kinerja dan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja seperti yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis dengan tahun sebelumnya

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Ket
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang		Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	96%	96%	100%	
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	65%	66,44%	102,215%	
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	100%	100%	100%	

Sesuai dengan tabel diatas, target sasaran strategis di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 tercapai. Dengan tercapainya target sasaran strategis ini menjelaskan bahwa deteksi dini potensi konflik dapat dilakukan dengan baik dan konflik yang timbul dimasyarakat tidak berpotensi menjadi konflik yang lebih luas lagi sehingga Tujuan dari sasaran strategis ini dapat tercapai yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera, memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. Penanganan konflik itu meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Realisasi Kinerja (%)					Capaian Kinerja (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang peran dan peran dalam wadah NKRI	Terantipasi dan penyelesaian potensi konflik Sosial (IPOLEKS OSBUDH ANKAM) sebelum menjadi konflik yang besar	Persentase potensi konflik sosial dan konflik SARA yang tertangani	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persentase partai dan ormas yang aktif dan memahami hak dan kewajibannya (tidak berkonflik) (pilgub)	60	62.15	-	-	-	-	103.58	-	-	-	-
	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di badan kesbangpol kota Tanjungpinang	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
Meningkatkan kondusi		Persentase fasilitasi	96					96					100

fitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang		penanganan potensi konflik										
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	65					66,44				102,215
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	100						100			

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Tabel 3.5
Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra (%)			Realisasi Kinerja (%)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang		Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	96	97	98	96	-	-
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	65	-	-	66,44	-	-
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	100	100	100	100	-	-

organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.4 Realisasi kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) lainnya

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja dengan SPM

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
			2024	2024
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	96	96
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	65	66,44
		Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	100	100

Karena Indikator Kinerja dari Tujuan dan sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tidak mengacu pada SPM atau standar nasional maka realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan

Dari Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

- a. Indikator kinerja tujuan “Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik” dan indikator kinerja sasaran strategis “Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi”

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
			2024	2024
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk		Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik	96	96

menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi	100	100
--	--	---	-----	-----

Pencapaian sasaran strategis ini dapat dilihat dari tercapainya target yaitu sebesar 100%. Pencapaian target ini dapat dilihat dari :

1. Penurunan jumlah konflik yang terjadi di Kota Tanjungpinang selama tahun 2024 yaitu Pada tahun 2024 ini kegiatan/aksi yang terjadi di Kota Tanjungpinang sepanjang tahun tercatat sebanyak 10 kali dimana 10 aksi diantaranya berpotensi memunculkan konflik karena isu dan momentum yang diangkat. Dari 10 aksi yang berpotensi konflik sosial tersebut dapat teratasi dengan baik sejumlah 8 aksi sementara sisanya 2 aksi, yang merupakan demonstrasi warga negara asing (WNA) memiliki potensi berlanjut meskipun akhirnya dapat diminimalkan dampaknya. Meskipun demikian Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki potensi penghalang terjadinya konflik sosial yaitu dengan memiliki 118 ormas atau lembaga masyarakat yang terdata dan bisa menjadi mitra untuk mengendalikan konflik yang mungkin terjadi akibat adanya aksi unjuk rasa.

Tabel 3.8
Data Kejadian Konflik Tahun 2024

No	Waktu	Kategori Konflik	Pihak yang Berkonflik	Lokasi Kejadian	Uraian Kejadian Singkat	Langkah yang Dilakukan	Ket
1	Tahun 2024	Sengketa Lahan	Sdr. Herryanto (pemohon lahan) dengan sdr. Swihok (pengklaim lahan) di jl. Ir sutami rt 06/ rw 01 kel. Kp.baru kec.tanjungpinang barat	Jl. Ir sutami rt 06/ rw 01 kel. Kp.baru kec.tanjungpinang barat	Pada hari jumat tanggal 14 juni 2024, pukul 09.00 wib bpn kota tanjungpinang melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral berdasarkan surat dari bpn kota tanjungpinang nomor : 105 / und-21.72.200.ip.02.02 / vi / 2024 tanggal 04 juni 2024 tentang undangan pengukuran dan pemetaan kadastral ulang Timbulnya konflik berupa aksi protes oleh sdr. Suihok yang tidak mengizinkan dilakukannya pengukuran dan pemetaan kadastral lahan di jl. Ir.sutami rt 06/rw 01 kel. Kampung baru	Melakukan penggalangan terhadap pihak yang berkonflik untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib, dan melakukan koordinasi kepada instansi terkait	

2	Tahun 2024	Sengketa Lahan	Pt. Terira pratiwi development (pt. Tpd) / pt. Kemayan bintang dengan masyarakat setempat yang berada diatas lahan tersebut	Lahan dampak kel. Dompok kec. Bukit bestari kota tanjungpinang	Permasalahan lahan yang sebelumnya pernah terjadi di tanah terindikasi terlantar hgb nomor : 00872/dompok atas nama pt. Terira pratiwi dan hgb nomor : 0874/dompok atas nama pt. Kemayan bintang, sehingga direktur pt. Terira pratiwi development dan pt. Kemayan bintang sdr ferry lee garcia sepakat untuk melepas lahan yang sudah berdirinya bangunan masyarakat dengan di diklarifikasi oleh tim terpadu agar tidak ada penyelewengan dengan memanfaatkan situasi tersebut.	Monitoring kegiatan pengukuran ulang bidang tanah pada hgb no : 00872/dompok atas nama pt. Terira pratiwi development (pt. Tpd) dan hgb no : 00874/dompok atas nama pt. Kemayan bintang bersama perangkat pemerintah kota tanjungpinang, camat bukit bestari, lurah dampak, rt dan rw setempat serta pihak perusahaan
3	Tahun 2024	Sengketa Lahan	Ada 3 pihak yang mengklaim memiliki surat dan hak yang sama di atas lahan yang disengketakan, sbb : Djodi wirahadikusuma, ahli waris djunaidi alias bun kwang diwakili rudi susemen, dan ahli waris bapak leo puho diwakili oleh ahli waris patrisius	Di atas lahan jalan wr. Soepratman (belakang aspol km 8/ indah rasa food court) kel. Air raja kec.tanjungpinang timur kota tanjungpinang.	Kegiatan rapat dengan surat nomor : 187/und-21.72.ip.02.02/viii/2024 perihal rapat mediasi di atas lahan jalan wr. Soepratman (belakang aspol km 8/ indah rasa food court) kel. Air raja kec.tanjungpinang timur, mediasi dilakukan dikarenakan sebelumnya dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral oleh bpn kota tanjungpinang pada hari jumat, tanggal 16 agustus 2024 dibatalkan dikarenakan ada 3 (tiga) pihak yang mengklaim memiliki surat dan hak yang sama di atas lahan yang disengketakan atas nama djodi wirahadikusuma, dkk serta surat saudara patrisius boli tobi tanggal 7 agustus 2024 perihal permintaan blokir proses, sertipikat hak milik, dan surat saudara rudy susemen tanggal 01 agustus 2023 perihal pemberitahuan/pemblokiran. Ketiga belah pihak mengklaim lahan diatas surat nomor: 158/g-1/1979 tanggal 26 desember 1979 atas nama maimunah.	1.Melaksanakan koordinasi bersama kepala seksi survey dan pemetaan bpn kota tanjungpinang reza wirawardhana, s.t. 2.Melaksanakan koordinasi dengan herman, sh selaku kuasa hukum djodi wirahadikusuma 3.Melaksanakan koordinasi dengan ahli waris leo puho diwakili oleh ahli waris patrisius
4	Tahun 2024	Sengketa Lahan	Pihak pt. Citra daya aditya dengan kp. Nusantara kel. Air raja kec. Tanjungpinang timur kota tanjungpinang	Di kp. Nusantara km.15 kel. Air raja kec. Tanjungpinang timur kota tanjungpinang	Penolakan perpanjangan hak guna bangunan (hgb) pt. Citra daya aditya oleh warga kampung nusantara, rt 001, 002, dan 003, rw 006 kelurahan air raja kota tanjungpinang dikarenakan sebagai berikut : 1.Pihak pt. Citra daya aditya tidak melaksanakan hak dan kewajiban untuk mendirikan bangunan selama 30 tahun. 2.Penolakan perpanjangan pt. Citra daya aditya dikarenakan	Monitoring terhadap bpn kota tanjungpinang, pihak pt. Citra daya aditya, dan masyarakat kp. Nusantara km 14 (rt 001,002,003 dan rw 006) kel. Air raja kecamatan tanjungpinang timur.

					<p>perusahaan tersebut tidak mempergunakan tanahnya dengan baik sesuai dengan awal pemberian haknya.</p> <p>3.Pt. Citra daya aditya telah melakukan penambangan bijih bauksit secara ilegal yang berdampak pada kerugian negara.</p> <p>4.Pemberian perpanjangan hgb pt. Citra daya aditya akan menyebabkan terusirnya ratusan kepala keluarga warga penggarap yang sudah mendiami lokasi tersebut sejak tahun 2004 atau sudah 20 tahun lamanya.</p> <p>Sebagian besar tanah di lokasi hgb pt. Citra daya aditya sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (rtrw) kota tanjungpinang.</p>	
5	Tanggal 20 Juli 2023 s/d Tanggal 30 Des 2024	Antar masy dng perusahaan	Pt. Pelindo (persero) regional i tanjungpinang	Pelabuhan sri bintang pura tanjungpinang	<p>Selama 5 (lima) tahun berturut - turut terminal sri bintang pura mengalami beban biaya keuangan melebihi pendapatan pas terminal sehingga untuk meningkatkan fasilitas pelayanan berupa sarana dan prasarana bagi pengguna jasa di pelabuhan sri bintang pura tanjungpinang, pt. Pelindo (persero) regional i tanjungpinang melakukan telaah dengan hasil telaah tersebut akan dilakukan penyesuaian tarif pas penumpang di pelabuhan sri bintang pura tanjungpinang</p>	<p>Monitoring rapat dengar pendapat (rdp) pertama pt. Pelindo (persero) regional i tanjungpinang bersama dprd kota tanjungpinang terkait rencana kenaikan tarif pass pelabuhan sri bin - Melakuka n pulbaket dan monitoring aksi unjukrasa wn afganistan di kantor unhr tanjungpinang.tan pura.</p>
6	Tahun 2021 s/d saat ini	Antar pok dng unhr	Pengungsi wn afganistan badhra resort kab. Bintan dengan perwakilan unhr	Kantor perwakilan unhr tanjungpinang jl. Peralatan km. 7 tanjungpinang	<p>Proses pemberangkatan para pengungsi ke negara ketiga yang terkesan lambat oleh pihak unhr tanjungpinang, sehingga pengungsi wn afganistan harus menunggu sampai 10 tahun belum juga diberangkatkan ke negara ketiga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pulbaket dan monitoring aksi unjukrasa wn afganistan di kantor unhr tanjungpinang. • Melakukan pulbaket terhadap pihak unhr tanjungpinang terkait lambatnya proses pemberangkatan wn afganistan. • Melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh pengungsi wn afganistan
7	2020 s/d saat ini	Antar pok masyarakat/ sara	Panitia pembangunan gereja bnkp	Rt.001 rw.003 kel. Air raja kec.	<p>Adanya penolakan dari masyarakat terkait pembangunan gereja bnkp karena tidak memenuhi skb 2 menteri, sampai</p>	<p>Melakukan pulbaket dan monitoring lokasi</p>

			dengan masyarakat rt.001 rw.003 kel. Air raja kec. Tanjungpinang timur kota tanjungpinang	Tanjungpinang timur kota tanjungpinang	saat ini pembangunan gereja bnkp dihentikan menunggu panitia gereja melengkapi persyaratan pembangunan gereja sesuai skb 2 menteri.	pembangunan gereja bnkp	
8	2020 s/d saat ini	Antar pok masyarakat/ sara	Pendirian rumah ibadah (gereja) gmi (gereja methodist indonesia)	Kelurahan air raja kecamatan tanjungpinang timur, kota tanjungpinang	Rumah tempat tinggal pendeta dijadikan sebagai tempat ibadah oleh jemaat gmi (gereja methodist indonesia) tanjungpinang, apabila ingin dijadikan rumah ibadah (gereja) harus melengkapi persyaratan sesuai skb 2 menteri tentang mendirikan rumah ibadah harus 90 untuk jemaat dan 60 dukungan dari penduduk setempat.	Koordinasi secara berkelanjutan terhadap perkembangan rencana pembangunan kedepannya dengan panitia pembangunan dan kelurahan air raja	
9	07 Maret 2024	Demonstrasi	WNA Asing (Afganistan)		Minta perbaikan Selther dan di kirim ke negara ke 3 (Amerika, Australia, New Zealand, Kanada dan Swiss) Sampai saat ini baik dari negara ke 3 belum ada penerimaan dan pembukaan pintu diplomatik masih dalam proses pihak UNHCR dan IOM	Demonstrasi long march dari Lapangan Pamedan sampai kantor UNHCR di kawal oleh pihak Kepolisian serta Binda Kepri	
10	27 Mei s.d 27 Juli 2024		WNA Asing (kelompok Mandiri sudan)		Meminta diberikan jaminan kehidupan yang layak dengan diberikan kebutuhan pokok dan penghasilan terutama untuk yang pengungsi mandiri Pihak UNHCR / IOM segera melaksanakan konseling kepada para pengungsi terkait daftar kebutuhan pokok sesuai dengan keadaan dan kebutuhan	Demonstrasi / Aksi menginap di depan kantor UNHCR / IOM dengan pengawasan dari pihak keamanan dan satgas PPLN selama lebih kurang 2 bulan	

2. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang. Sebagaimana diketahui, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM/Partai Politik;
2. Penerbitan rekomendasi Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Tabel 3.9
Jumlah SKT dan rekomendasi penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang sudah diterbitkan

No	Kegiatan	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM	2	2	2	-	2	1	7	3	3	3	-	-	25
2	Penerbitan rekomendasi Penelitian	34	27	19	29	53	50	42	16	27	41	56	28	422

dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)														
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja tujuan “Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik” dan indikator kinerja sasaran strategis “Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi” yaitu :

1. Dukungan dana dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang;
2. Kecepatan respon pimpinan dan staf terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan. Cepat Tanggap pimpinan ketika muncul persoalan di masyarakat dan dalam penyelesaian persoalan tersebut;
3. Sinergisitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di Kota Tanjungpinang seperti FKUB, FKDM, FPK, dan FORKOPIMDA;
4. Partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Tanjungpinang Turut sertanya masyarakat di dalam memelihara ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat itu sendiri, dan didukung dengan telah di selenggarakan pelatihan untuk masyarakat dalam deteksi dini masalah IPOLEKSOSBUD;
5. Kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan wawasan kebangsaan. Sinergitas tiga pilar (Polisi, TNI dan Pemerintah Kota) berjalan beriringan hingga tingkat kecamatan dan juga kelurahan. Baik dalam sosialisasi dan juga tindakan;
6. Dukungan warga Tanjungpinang secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kota Tanjungpinang.

Beberapa faktor penghambat tercapainya sasaran indikator ini yaitu :

1. Heterogenya masyarakat Kota Tanjungpinang, sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya;
2. Letak geografis Kota Tanjungpinang yang sebagian besar wilayahnya lautan dan berbatasan langsung dengan negara luar, sehingga menjadi

- daerah tujuan tempat pengungsian untuk warga negara asing dan ini menyebabkan rawan terjadinya konflik sosial dan konflik SARA;
3. Kecenderungan aksi demo yang mengarah ke anarkhis.
Masih maraknya aksi demo yang mengarah pada tindakan anarkhis, akan berakibat pada terganggunya rasa keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Kecenderungan tindakan anarkhis dalam aksi demo, di sebabkan oleh banyak faktor, mulai dari tingkat pengamanan dari aparat keamanan yang kurang, tingkat kesadaran hukum dari para peserta demo sampai dengan tidak terselesaikannya tuntutan yang disampaikan. Aksi demo yang berulang-ulang akibat dari belum terpenuhi dan terselesaikannya tuntutan yang disampaikan, akan dapat memicu tingkat emosional dari para pendemo yang akhirnya melakukan tindakan anarkhis. Di samping itu, banyak dari para pelaku anarkhis merasa kesal karena tidak di temuinya mereka setiap melakukan aksi oleh pejabat yang berwenang, sehingga mereka merasa tidak dihargai sehingga membangkitkan rasa emosional.
 4. Kurangnya pemahaman akan wawasan kebangsaan
Dalam era globalisasi sekarang ini, telah mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan negaranya lambat laun semakin terkikis, dan berubah dengan generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa. Banyak di kalangan anak-anak muda yang sudah tidak lagi mengenal Pancasila sebagai dasar negara, semboyan Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Empat konsensus kebangsaan ini menjadi kunci utama tegaknya NKRI di masa yang akan datang. Kita harus terus menanamkan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda agar tidak kehilangan jati diri bangsanya dan membentengi diri dari arus derasnya budaya asing yang masuk ke Indonesia.
 5. Munculnya paham radikalisme dan mulai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;
 6. Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkotika di Kota Tanjungpinang yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.

b. Indikator kinerja tujuan “Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih”

Tabel 4.0
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
			2024	2024
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih	65	66,44

Untuk mencapai indikator kinerja tujuan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang melakukan beberapa kegiatan yaitu :

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan Demokrasi;
- c. Pembinaan Partai Politik dan Pendidikan Politik.

Pada Tahun 2024 ini, Partai Politik yang mendapatkan bantuan yaitu :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Partai Golongan Karya;
3. Partai Hati Nurani Rakyat;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Keadilan Sejahtera;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Partai Amanat Nasional;
8. Partai Persatuan Pembangunan;
9. Partai Nasdem;
10. Partai Kebangkitan Bangsa.

Dan pendidikan politik yang dilakukan yaitu :

Tabel 4.1
Pendidikan Politik Tahun 2024

No	Partai Politik	Jenis Kegiatan Pendidikan Politik	Lokasi	Waktu	Jml Keg	Jlh Peserta Pendidikan Politik	Ket
1	PDIP	Pelatihan SATGAS DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang	Kantor DPC PDI P Kota Tanjungpinang	Juni 2024	1	150	
		Pelatihan Kader Perempuan (SARINAH)	Tanjungsiambang Dompok	Agustus 2024	1	200	
		Pelatihan Saksi pada pelaksanaan Pilkada 2024	Kantor DPC PDI P Kota Tanjungpinang	November 2024	1	130	

2	Golkar	Pelatihan/BIMTEK SAKSI TPS PILEG 2024 Partai Golkar Kota Tanjungpinang	Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Tanjungpinang	Kamis-Minggu, 1-4 Februari 2024	1	650	
3	NASDEM	Konsolidasi Pemenangan Pileg Dan Pilpres 2024	Trans Convention Centre (TCC) Aston	3 Februari 2024	1	480	Penguatan Internal Guna Memenangkan Pileg 2024 & Capres Usungan Nasdem
		Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2024	Restoran Nelayan	23 September 2024	1	400	
4	PKS	Sosialisasi Pilkada Kepada Pemilih Perempuan	Tanjungpinang	30 Agustus 2024	1	180	
5	PKB	Bimtek Pengurus DPC - DPAC Bukit Bestari Dengan Calon Saksi Tps PKB		12 Januari 2024	1	165	
6	PPP	Dialog Interaktif DPC PPP Kota Tanjungpinang bersama PAC Tanjungpinang Barat dan pengurus Ranting se-Kecamatan Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang	20 April 2024	1	200	
7	GERINDRA	Workshop & Training Of Trainner Saksi TPS Partai Gerindra Kecamatan Tanjungpinang Barat dalam Rangka Pemenangan Pemilu 2024	Tanjungpinang	7 Januari 2024	1	100	
		Workshop & Training Of Trainner Saksi TPS Partai Gerindra Kecamatan Tanjungpinang Kota dalam Rangka Pemenangan Pemilu 2024	Tanjungpinang	14 Januari 2024	1	100	
		Workshop & Training Of Trainner Saksi TPS Partai Gerindra Kecamatan Bukit Bestari dalam Rangka Pemenangan Pemilu 2024	Tanjungpinang	21 Januari 2024	1	100	
		Workshop & Training Of Trainner Saksi TPS Partai Gerindra Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam Rangka Pemenangan Pemilu 2024	Tanjungpinang	28 Januari 2024	1	100	
8	HANURA	Workshop Peran Pendidikan Politik	Tanjungpinang	26 Oktober 2024	1	100	

		Dalam Kehidupan Masyarakat					
9	PAN	Pembekalan Kader Menghadapi Pilwako	Rumah PAN Tanjungpinang	25 Agustus & 29 Oktober 2024	2	90	
		Pelatihan Koordinator Saksi	Rumah PAN Tanjungpinang	15, 22, 23 November 2024	3	108	

Dengan adanya bantuan dan pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan dan setiap individu tidak hanya sekedar mengetahui tapi juga dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik, serta untuk membangun etika dan moral politik dengan sikap dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres, pileg dan pemilukada.

Gambar 3.1
Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2024



Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang tingkat partisipasi masyarakatnya menurut data dari KPU Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dengan jumlah 172.502 Pemilih, dan yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 93.497 pemilih suara sah dan 4163 pemilih suara tidak sah dengan presentase partisipasi Masyarakat sebesar 56,61%.

Gambar 3.2
Partisipasi Masyarakat dalam PILKADA Kota Tanjungpinang Tahun 2024



Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja tujuan “Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih” yaitu :

1. Dukungan dana dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Kebebasan berdemokrasi dari Parpol, Ormas dan Perguruan Tinggi.
Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dengan beragam kondisi politik dan ekonomi dan sosial yang akhirnya bermunculan organisasi masyarakat, partai politik dan juga organisasi kemahasiswaan. Kota Tanjungpinang sendiri memberikan ruang dan fasilitasi untuk berdemokrasi bagi seluruh warganya yang ingin menyampaikan pendapatnya di depan umum tanpa terjadi gangguan ketentraman dan kenyamanan kota;
3. Dukungan Pemerintah Pusat/Provinsi, OPD Kota Tanjungpinang, jajaran samping dan lembaga lainnya untuk ketentraman dan kenyamanan

- lingkungan dan wawasan kebangsaan. Koordinasi yang baik lintas sektor antara pemerintahan dan jajaran samping yang terjalin menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai Kota yang tentram dan nyaman bagi penduduk Kota Tanjungpinang sendiri maupun bagi penduduk pendatang;
4. Partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Tanjungpinang. Turut sertanya masyarakat di dalam memelihara ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat itu sendiri;
 5. Kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan wawasan kebangsaan. Sinergitas tiga pilar (Polisi, TNI dan Pemerintah Kota Tanjungpinang) berjalan beriringan hingga tingkat kecamatan dan juga kelurahan. Baik dalam sosialisasi dan juga tindakan.

Beberapa faktor yang penghambat tercapainya indikator kinerja tujuan “Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih” yaitu :

1. Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas dan LSM guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Masih rendahnya koordinasi politik dan munculnya sikap apatis terhadap pemerintah;
3. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
4. Kurang aktifnya partai dan ormas untuk memberikan edukasi ke masyarakat Kota Tanjungpinang.

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut dengan :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi;
2. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat;

3. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku;
4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan;
5. Memaksimalkan peran media sosial untuk diseminasi dan kampanye mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, dan kerukunan antar agama serta suku bangsa, agar pesan yang akan disampaikan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat umum.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang selama Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut :

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:
Realisasi secara fisik telah mencapai target, untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan adanya beberapa belanja yang tunda bayar dan ada beberapa kegiatan yang Sub kegiatan tidak ada di renstra karena belum terdapat di Permendagri saat pengesahan renstra.

Tabel 4.2
Realisasi Fisik dan Keuangan per Sub Kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Pagu Anggaran 2024		Realisasi 2024		
						K	Rp	K	Rp	%
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan		Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi					11.536.351.436		10.614.527.312	92.00
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi					11.536.351.436		10.614.527.312	92.00

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Skor	72	5.204.647.536	77,75	5.000.669.974	96.08
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	39.499.000	105,88	29.121.575	73.73
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	27.991.000	2	22.852.075	81.64
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	3.808.000	3	2.435.000	63.94
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.747.000	1	1.869.000	49.88
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	3.953.000	12	1.965.500	49.72
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	94	4.520.905.936	96,77	4.449.145.937	98.41
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bl n	360	4.520.905.936	286	4.449.145.937	98.41
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	222.462.000	100	160.897.138	72.32
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7.818.000	1	7.138.000	91.30
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	40.858.000	3	19.876.000	48.65

			Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	37.608.000	2	28.836.000	76.68
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.500.000	12	1.440.000	96.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	134.678.000	12	103.607.138	76.93
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	Persentase	100	288.050.600	100	278.670.324	96.74
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	19.515.000	12	17.920.200	91.83
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	268.535.600	12	260.750.124	97.10
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase	100	133.730.000	100	82.835.000	61.94
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	100.680.000	8	50.800.000	50.46
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	33.050.000	26	32.035.000	96.93
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	1.882.041.500	100	1.564.204.912	83.11
				2.Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan	%	20		43,41		

				ideologi pancasila dan karakter bangsa						
			Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	2	1.882.041.500	1	1.564.204.912	83.11
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	41	202.994.500	41	91.100.000	44.88
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan"	Laporan	2	15.000.000	2	3.000.000	20.00
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	165	30.970.000	165	24.970.000	80.63
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil	Dokumen	1	45.702.000	1	43.547.950	95.29

			Purnapaskibraka	Pembinaan Purnapaskibraka						
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	30	1.514.450.000	30	1.398.986.962	92.38
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan	1	24.410.000	1	2.600.000	10.65
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan	1	25.000.000	0	0	0
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	27	23.515.000	0	0	0
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	21	74.654.000	22,85	15.479.815	20.73
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	3	74.654.000	1	15.479.815	20.73
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	66.287.000	50	11.854.565	17.88
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	8.367.000	50	3.625.250	43.33
			PROGRAM PEMBINAAN DAN	1.Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan	%	80	301.371.000	100	235.266.800	78.06

			PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama						
				2.Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	%	5		5,464		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Dokumen	2	301.371.000	2	235.266.800	78.06
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	243	112.434.000	243	79.791.700	70.97
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	151	159.045.000	151	137.495.752	86.45
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	laporan	4	29.892.000	4	17.979.348	60.15

			Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Persentase	100	4.073.637.400	100	3.798.905.811	93.25
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	5	4.073.637.400	9	3.798.905.811	93.25
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	120	9.960.000	30	9.816.871	98.56
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Orang	414	262.210.000	414	251.468.500	95.90

			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	60	135.113.000	60	134.823.500	99.78
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	3.666.354.400	4	3.402.796.940	92.81
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih					14.759.462.770		14.746.811.370	99.91
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase	100	14.759.462.770	100	14.746.811.370	99.91
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Dokumen	3	14.759.462.770	7	14.746.811.370	99.91

			Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	90	1.335.744.770	90	1.327.343.370	99.37
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	35	13.391.252.000	35	13.387.462.000	99.97
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Laporan	12	32.466.000	12	32.006.000	98.58

			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
T o t a l							26.295.814.206		25.361.338.682	96.45

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang selama Tahun 2024, program/kegiatan tahun 2024 yang dijalankan semuanya sudah mendukung untuk tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota tahun 2024-2026.

Tabel 4.3
Perbandingan antara Target Renstra 2024-2026 dengan Realisasi 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target RPD/Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode RPD/Renstra)		Pagu Anggaran 2024	Realisasi 2024		
						K	Rp		K	Rp	%
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan		Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi						11.536.351.436		10.614.527.312	92.00
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi						11.536.351.436		10.614.527.312	92.00

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Skor	74	8.059.272.067	5.204.647.536	77,75	5.000.669.974	96.08
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perse ntase	100	354.300.000	39.499.000	105,88	29.121.575	73.73
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	2	17.600.000	27.991.000	2	22.852.075	81.64
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	1	82.500.000	3.808.000	3	2.435.000	63.94
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	5	65.000.000	3.747.000	1	1.869.000	49.88
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	13	24.200.000	3.953.000	12	1.965.500	49.72
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Perse ntase	94	5.035.455.937	4.520.905.936	96,77	4.449.145.937	98.41
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bln	384	4.945.455.937	4.520.905.936	286	4.449.145.937	98.41
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Perse ntase	100	29.040.000	0	100	0	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	44	14.520.000	0	1	0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	Perse ntase	100	1.219.785.630	222.462.000	100	160.897.138	72.32

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	48.400.000	7.818.000	1	7.138.000	91.30
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	84.700.000	40.858.000	3	19.876.000	48.65
			Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	84.700.000	37.608.000	2	28.836.000	76.68
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	36.300.000	1.500.000	12	1.440.000	96.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	585.885.630	134.678.000	12	103.607.138	76.93
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase	100	600.000.000	0	0	0	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	225.000.000	0	0	0	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	-	-	0	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	Persentase	100	485.490.500	288.050.600	100	278.670.324	96.74
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	78.650.000	19.515.000	12	17.920.200	91.83
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	324.340.500	268.535.600	12	260.750.124	97.10
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase	100	280.200.000	133.730.000	100	82.835.000	61.94

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	84.700.000	100.680.000	8	50.800.000	50.46
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	60.500.000	33.050.000	26	32.035.000	96.93
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	2.580.000.000	1.882.041.500	100	1.564.204.912	83.11
				2.Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	%	40			43, 41		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	2	2.580.000.000	1.882.041.500	1	1.564.204.912	83.11
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	230	1.930.000.000	202.994.500	41	91.100.000	44.88
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan"	Laporan	1	150.000.000	15.000.000	2	3.000.000	20.00

			Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	195	200.000.000	30.970.000	165	24.970.000	80.63
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen			45.702.000	1	43.547.950	95.29
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang			1.514.450.000	30	1.398.986.962	92.38
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan			24.410.000	1	2.600.000	10.65
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan			25.000.000	0	0	0
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang			23.515.000	0	0	0
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perse ntase	23	360.000.000	74.654.000	22, 85	15.479.815	20.73
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	3	360.000.000	74.654.000	1	15.479.815	20.73

			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	200.000.000	66.287.000	50	11.854.565	17.88
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	100.000.000	8.367.000	50	3.625.250	43.33
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	%	80	240.000.000	301.371.000	100	235.266.800	78.06
				2.Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	%	6			5,464		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Dokumen	2	240.000.000	301.371.000	2	235.266.800	78.06
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	329	40.000.000	112.434.000	243	79.791.700	70.97

			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	151	140.000.000	159.045.000	151	137.495.752	86.45
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	1	20.000.000	29.892.000	4	17.979.348	60.15
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	Perse ntase	100	400.000.000	4.073.637.400	100	3.798.905.811	93.25
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Doku men	5	400.000.000	4.073.637.400	9	3.798.905.811	93.25
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Orang	120	75.000.000	9.960.000	30	9.816.871	98.56

			Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	558	75.000.000	262.210.000	414	251.468.500	95.90
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	60	75.000.000	135.113.000	60	134.823.500	99.78
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	75.000.000	3.666.354.400	4	3.402.796.940	92.81
		Persentase Tingkat						14.759.462.770		14.746.811.370	99.91

		Partisipasi Pemilih									
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perse ntase	100	3.000.000.000	14.759.462.770	100	14.746.811.370	99.91
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Doku men	2	3.000.000.000	14.759.462.770	7	14.746.811.370	99.91
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	30	2.000.000.000	1.335.744.770	90	1.327.343.370	99.37
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Orang	35	300.000.000	13.391.252.000	35	13.387.462.000	99.97

			Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	430.000.000	32.466.000	12	32.006.000	98.58
Total							26.295.814.206			25.361.338.682	96.45

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar Rp 25.361.338.682 atau sebesar 96,45% dari total anggaran yang dialokasikan. Sebanyak Rp 5.204.647.536 atau sebesar 19,79% anggaran dialokasikan untuk mendanai kegiatan internal seperti gaji pegawai, rutinitas kantor, pemeliharaan sarana prasarana kantor. Sedangkan sebanyak 80,21% atau sebesar Rp 21.091.166.670 anggaran dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan eksternal yang mendukung keberhasilan sasaran program. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Realisasi Keuangan per Kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan		Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi		11.536.351.436	10.614.527.312	92.00
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi		11.536.351.436	10.614.527.312	92.00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.204.647.536	5.000.669.974	96.08
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.499.000	29.121.575	73.73
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.991.000	22.852.075	81.64
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.808.000	2.435.000	63.94
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.747.000	1.869.000	49.88
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.953.000	1.965.500	49.72

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.520.905.936	4.449.145.937	98.41
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.520.905.936	4.449.145.937	98.41
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.462.000	160.897.138	72.32
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.818.000	7.138.000	91.30
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.858.000	19.876.000	48.65
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.608.000	28.836.000	76.68
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.440.000	96.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.678.000	103.607.138	76.93
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.050.600	278.670.324	96.74
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.515.000	17.920.200	91.83
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.535.600	260.750.124	97.10
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.730.000	82.835.000	61.94
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.680.000	50.800.000	50.46
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.050.000	32.035.000	96.93
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.882.041.500	1.564.204.912	83.11
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	1.882.041.500	1.564.204.912	83.11

			Kebangsaan			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	202.994.500	91.100.000	44.88
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15.000.000	3.000.000	20.00
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30.970.000	24.970.000	80.63
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	45.702.000	43.547.950	95.29
			Pembentukan Paskibraka	1.514.450.000	1.398.986.962	92.38
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	24.410.000	2.600.000	10.65
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	25.000.000	0	0
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	23.515.000	0	0
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	74.654.000	15.479.815	20.73
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	74.654.000	15.479.815	20.73

			Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	66.287.000	11.854.565	17.88
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.367.000	3.625.250	43.33
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	301.371.000	235.266.800	78.06
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	301.371.000	235.266.800	78.06
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	112.434.000	79.791.700	70.97
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	159.045.000	137.495.752	86.45

			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29.892.000	17.979.348	60.15
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.073.637.400	3.798.905.811	93.25
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.073.637.400	3.798.905.811	93.25
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9.960.000	9.816.871	98.56
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	262.210.000	251.468.500	95.90
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	135.113.000	134.823.500	99.78

			Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3.666.354.400	3.402.796.940	92.81
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih		14.759.462.770	14.746.811.370	99.91
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	14.759.462.770	14.746.811.370	99.91
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	14.759.462.770	14.746.811.370	99.91
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.335.744.770	1.327.343.370	99.37
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	13.391.252.000	13.387.462.000	99.97

			Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.466.000	32.006.000	98.58
T o t a l				26.295.814.206	25.361.338.682	96.45

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa program yang memiliki serapan anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yaitu sebesar 99.91%. Hal ini dapat tercapai karena selain karena tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah juga dari segi perencanaan dan penganggaran yang tepat serta kerjasama antara Bakesbangpol dengan berbagai pihak terkait. Sedangkan program yang memiliki serapan anggaran paling rendah adalah Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sebesar 27,73%. Karena pada program ini ada beberapa rekening belanja yang mengalami tunda bayar.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 1 dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, indikator Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 96 % dari target 96 % sehingga capaian IKU mencapai 100 % dan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih juga telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 66,44 % dari target 65 % sehingga capaian IKU mencapai 102,215 %;
2. Penyerapan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 25.361.338.682 atau sebesar 96,45% dari total anggaran sebesar Rp. 26.295.814.206.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Bimtek dan rapat koordinasi internal untuk peningkatan kompetensi SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang;
2. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi;
3. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode;
4. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku;
5. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol;
7. Meningkatkan peran media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan antar suku bangsa agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat luas, sehingga tercipta kondusifitas dan stabilitas daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 yang dapat Kami sampaikan agar dapat menjadi bahan pertimbangan demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tahun 2025 mendatang. Usulan, ide kreatif, inovasi dan saran yang membangun dari segala pihak diharapkan guna tercapainya tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SAMSUDI, S.Sos., M.H.

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDRI RIZAL, S.E., M.M.

Jabatan : Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. Wali Kota Tanjungpinang

ANDRI RIZAL, S.E., M.M.

Tanjungpinang, 30 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Tanjungpinang

SAMSUDI, S.Sos., M.H.
NIP. 19720906 199403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
				2023	2024	2025
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerja sama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah	Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksusbud) yang difasilitasi	Persen	100	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	77,70	-	76

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.392.874.135	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.645.335.850	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.458.949.518	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 100.000.000	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 140.483.000	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 887.403.000	APBD

Pj. Wali Kota Tanjungpinang

ANDRI RIZAL, S.E., M.M.

Tanjungpinang, 30 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

SAMSUDI, S.Sos., M.H.
NIP. 19720906 199403 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAMSUDI, S.Sos, M.H

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang,

SAMSUDI, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

Sekretaris,

DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19790526 199810 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.	Skor 73

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.392.874.135,00	APBD
	Jumlah	Rp 4.392.874.135,00	

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang,

Sekretaris,



SAMSUDI, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006



DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19790526 199810 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANUNG TRI SAPUTRA, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAMSUDI, S.Sos, M.H
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang,

SAMSUDI, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi
Sosial Budaya dan Agama,

ANUNG TRI SAPUTRA, ST
Pembina
NIP. 19761228 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penguatan Ideologi dan Karakter Bangsa	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
		Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	30%
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	80%
		Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya	5%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.645.335.850,00	APBD
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 140.483.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 1.785.818.850,00	

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang,

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi
Sosial Budaya dan Agama,

SAMSUDI, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

ANUNG TRI SAPUTRA, ST
Pembina
NIP. 19761228 200604 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANIK MURTIANI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAMSUDI, S.Sos, M.H
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang,

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Masyarakat,

SAMSUDI, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

ANIK MURTIANI, SH
Pembina
NIP. 19730820 200701 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	22%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1.458.949.518,00	APBD
2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 100.000.000,00	APBD
Jumlah		Rp 1.558.949.518,00	

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang,

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemsyarakatan,

SAMSUDI, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

ANIK MURTIANI, SH
Pembina
NIP. 19730820 200701 2 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESY AFRIYANTI, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAMSUDI, S.Sos, M.H
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang,

SAMSUDI, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik,

DESY AFRIYANTI, S.E
Pembina
NIP. 19771013 200604 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 887.403.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 887.403.000,00	

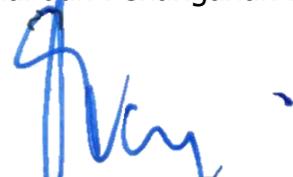
Tanjungpinang, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang,



SAMSUDI, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik,



DESY AFRIYANTI, SE
Pembina
NIP. 19771013 200604 2 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RITA HARWENI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Sekretaris,

DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790526 199810 1 001

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Keuangan

RITA HARWENI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19821213 200701 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN UMUM. KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan kerumah tanggaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	94%
		Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah	100%
		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah	100%
		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	7%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.849.892.035,00	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 5.010.000,00	APBD	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 31.574.000,00	APBD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 11.755.000,00	APBD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 93.604.500,00	APBD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 3.630.000,00	APBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 277.525.600,00	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 93.350.000,00	APBD

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 5.680.000,00 APBD
Lainnya

Jumlah Rp. 4.372.021.135,00

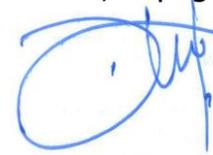
Tanjunpinang, 31 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sekretaris,



DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790526 199810 1 001



RITA HARWENI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19821213 200701 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDA SISMANELY, SKM
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP
Jabatan : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Sekretaris,

DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790526 199810 1 001

Perencana Ahli Muda,

INDA SISMANELY, SKM
Penata Tk. I
NIP. 19801219 200604 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA AHLI MUDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.	Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.791.500,00	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 5.472.000,00	APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 5.563.000,00	APBD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.026.500,00	APBD
Jumlah				Rp. 20.853.000,00	

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Sekretaris,

DEKI ISKANDAR DINATA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790526 199810 1 001

Perencana Ahli Muda,

INDA SISMANELY, SKM
Penata Tk. I
NIP. 19801219 200604 2 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KURNIAWATI
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANUNG TRI SAPUTRA, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi
Sosial Budaya dan Agama,

ANUNG TRI SAPUTRA, ST
Pembina
NIP. 19761228 200604 1 003

Analis Kebijakan Ahli Muda,

KURNIAWATI
Penata Tk. I
NIP. 19680616 199205 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 247.400.000,00	APBD
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Rp. 7.330.000,00	APBD
			Pembinaan Terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Rp. 21.433.000,00	APBD
			Pembentukan Paskibraka	Rp. 1.314.164.850,00	APBD
			Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp. 16.301.000,00	APBD
			Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Rp. 19.317.000,00	APBD

Pengangkatan Purnapaskibraka
Duta Pancasila

Rp. 19.390.000,00

APBD

Jumlah Rp. 1.645.335.850,00

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama,



ANUNG TRI SAPUTRA, ST

Pembina

NIP. 19761228 200604 1 003



KURNIAWATI

Penata Tk. I

NIP. 19680616 199205 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKARNAIN, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANUNG TRI SAPUTRA, ST
Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi
Sosial Budaya dan Agama,

ANUNG TRI SAPUTRA, ST
Pembina
NIP. 19761228 200604 1 003

Analis Kebijakan Ahli Muda,

ZULKARNAIN, SE
Penata Tk. I
NIP. 19790310 200701 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	2 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 10.900.000,00	APBD
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 129.583.000,00	APBD
			Jumlah	Rp. 140.483.000,00	

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi Sosial Budaya dan Agama,



ANUNG TRI SAPUTRA, ST
Pembina
NIP. 19761228 200604 1 003

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



ZULKARNAIN, SE
Penata Tk. I
NIP. 19790310 200701 1 017

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARISSA NARDI, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANIK MURTIANI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan,

Analis Kebijakan Ahli Muda

ANIK MURTIANI, SH
Pembina
NIP. 19730820 200701 2 014

MARISSA NARDI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19830428 200803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 1.434.521.018,00	APBD

Budaya Politik	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.	24.428.500,00	APBD
----------------	--	---	-----	---------------	------

Jumlah Rp. 1.458.949.518,00

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan,



ANIK MURTIANI, SH
Pembina
NIP. 19730820 200701 2 014



MARISSA NARDI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19830428 200803 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUBAGUS HIDAYAT, SH
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANIK MURTIANI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan,

Analis Kebijakan Ahli Muda

ANIK MURTIANI, SH
Pembina
NIP. 19730820 200701 2 014

TUBAGUS HIDAYAT, SH
Penata TK. I
NIP. 19740820 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 100.000.000	APBD
			Jumlah	Rp. 100.000.000	

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan,



ANIK MURTIANI, SH

Pembina

NIP. 19730820 200701 2 014

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Analisis Kebijakan Ahli Muda



TUBAGUS HIDAYAT, SH

Penata Tk. I

NIP. 19740820 200604 1 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANTI ANDRIANI, ST
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DESI AFRIYANTI, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

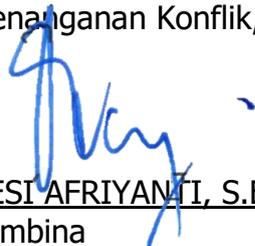
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik,


DESI AFRIYANTI, S.E

Pembina

NIP. 19771013 200604 2 004

Analis Kebijakan Ahli Muda,


YANTI ANDRIANI, ST

Penata Tk. I

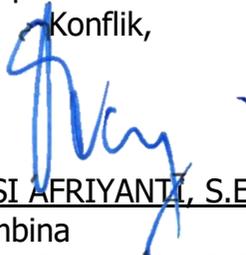
NIP. 19761113 200212 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 616.683.000,00	APBD
Jumlah				Rp. 616.683.000,00	

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik,



DESI AFRIYANTI, S.E

Pembina

NIP. 19771013 200604 2 004

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Analisis Kebijakan Ahli Muda



YANTI ANDRIANI, ST

Penata Tk. I

NIP. 19761113 200212 2 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL KHILAL, S.IP
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DESI AFRIYANTI, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

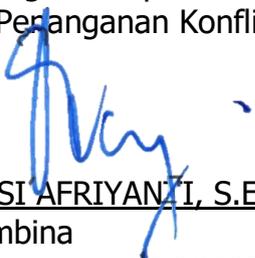
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

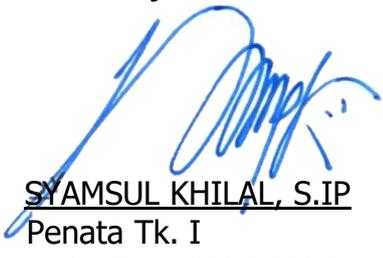
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik,


DESI AFRIYANTI, S.E
Pembina
NIP. 19771013 200602 2 004


SYAMSUL KHILAL, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 19770606 200604 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

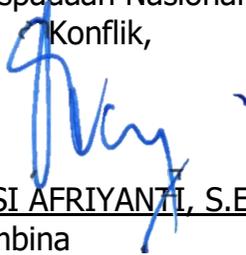
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 139.424.000,00	APBD
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Rp. 131.296.000,00	APBD

antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Jumlah Rp. 270.720.000,00

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik,


DESI AFRIYANTI, S.E
Pembina
NIP. 19771013 200604 2 004

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

Analisis Kebijakan Ahli Muda


SYAMSUL KHILAL, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 19770606 200604 1 022

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG



JL. DAENG CELAK GEDUNG A LANTAI 3 & 4 SENGGARANG
KOTA TANJUNGPINANG